

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Santoso. 2013. *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Jakarta: Laksbang Persindo.
- Alik Alamsyah Ansyori. 2001. *Rekayasa Jalan Raya*. Malang: UMM Press.
- Amiek Sumindriyatmi, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
- Asmaeny Azis Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Pustaka Harapan.
- Clarkson H.Oglesby. 1999. *Teknik Jalan Raya*. Jakarta: Erlangga.
- Daud Salalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Emi Emilia. 2008. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Irawan Soejito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Lexi J.Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda karya.

- Marzuki Lubis. 2011. *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah Dalam Ketatabegaraan Indoneisa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- N. H. T. Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Philipus M. Hadjon, dkk.. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinyo Harry Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia.

W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono. 2009. *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogtakarta: Universitas Atma Jaya.

Zainuddin Ali. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2013-2031.

Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2013-2031.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Uapaya Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Solok

### C. Website

Berita Minang.com, Proyek Belum Selesai Jalan Alahan Panjang-Sariak Alahan Tigo Rusak Parah, <https://www.beritaminang.com/berita/2348/proyek-belum-selesai-jalan-alahan-panjang-sariak-alahan-tigo-rusak-parah.html>, pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 06.01 WIB.

